

LAPORAN UJI PETIK

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Capaian pelaksanaan Program KOTAKU OSP 7 Kalimantan Timur sampai dengan triwulan 2 tahun 2019 terutama dalam pemanfaatan BPM masih cukup rendah untuk pemanfaatan di KSM. Dari tiga kelurahan/desa lokasi BPM 2019 rata-rata capaian baru mencapai 5% dari alokasi BPM termin 1 2019. Capaian tertinggi di kelurahan Tanjung Laut Indah kota Bontang dengan capaian sampai dengan 10%, kemudian desa Loa Janan Ulu kabupaten Kutai Kartanegara dengan capaian 8%, sedangkan di kelurahan Pelita belum pencairan BPM karena masih terkendala SK Satker yang masih belum terbit. Capaian Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tingkat OSP mencapai 54.33% dimana dari capaian tersebut hanya menyisahkan 1 item pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat yakni livelihood sedangkan yang masih banyak belum terlaksana adalah paket sosialisasi dan media sosialisasi. Data hasil audit independen tahun buku 2018 semua kelurahan sudah selesai melaksanakan audit dan hasil audit/opini audit juga sudah keluar. Terkait dengan pemanfaatan BPM 2019 jika melihat target dari OSP maka capaian tersebut diatas tidak sesuai dengan target OSP bahwa seharusnya minimal 50% BPM termin 1 2019 sudah seharusnya terserap atau termanfaatkan oleh KSM. Target pengurangan kumuh tahun 2019 seluas 103.95 juga menjadi perhatian OSP 7 tentu saja dengan melihat ketersediaan BPM 2019 yang hana untuk 3 kelurahan maka tentu saja perlu mencari alternatif sumber pembiayaan oleh BKM/LKM untuk penanganan kumuh, oleh karena itu OSP ingin memastkan sejauh mana capaian kolaborasi yang telah dicapai oleh BKM/LKM agar target 0 ha kumuh tahun 2019 dapat tercapai. Disamping Kelembagaan BKM juga menjadi fokus OSP untuk ditingkatkan kinerjanya dari data penilaian kinerja kelembagaan BKM/LKM bahwa mayoritas BKM/LKM memiliki hasil penilaian yang sudah mandiri.

2. Tujuan Uji Petik

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka tujuan dilaksanakannya uji petik adalah :

- a. Memastikan kesiapan dokumen teknis sebagai syarat pemanfaatan BPM 2019
- b. Memastikan kesiapan BKM dan KSM untuk memanfaatkan dana BPM tahun 2019
- c. Memastikan pelaksanaan PKM 2018 dan 2019 tepat sasaran
- d. Memastikan kesiapan BKM/LKM dan Pemda dalam mendukung kolaborasi pengurangan kumuh
- e. Memastikan kinerja kelembagaan BKM/LKM

3. Rekapitulasi Lokasi uji petik

Sesuai dengan latar belakang dan tujuan pelaksanaan uji petik maka pemilihan lokasi uji petik adalah di kelurahan-kelurahan yang telah ditentukan sesuai dengan masalah yang akan di gali. Adapun kelurahan/desa lokasi uji petik pada triwula ke dua ini sebagai berikut :

No	Kota/Kabupaten	Kelurahan	Materi Uji Petik
1	Bontang	Tanjung Laut Indah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persiapan pemanfaatan BPM 2019 2) Efektifitas Pelaksanaan PKM 2018 & 2019 3) Kelembagaa BKM (pemilu, audit, PPM) 4) Pemeliharaan dan pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur 5) Kolaborasi penanganan kumuh
2	Bontang	Gunung Elai	<ol style="list-style-type: none"> 1) Efektifitas Pelaksanaan PKM 2018 2) Kelembagaa BKM (pemilu, audit, PPM) 3) Kolaborasi penanganan kumuh
3	Bontang	Brebes Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Efektifitas Pelaksanaan PKM 2018 2) Kelembagaa BKM (pemilu, audit, PPM) 3) Pemeliharaan dan pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur 4) Kolaborasi penanganan kumuh
4	Kutai Kartanegara	Loa Janan Ulu	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persiapan pemanfaatan BPM 2019 2) Efektifitas Pelaksanaan PKM 2018 & 2019 3) Kelembagaa BKM (pemilu, audit, PPM) 4) Pemeliharaan dan pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur 5) Kolaborasi penanganan kumuh
5	Kutai Kartanegara	Mangkurawang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Efektifitas Pelaksanaan PKM 2018 2) Kelembagaa BKM (pemilu, audit, PPM) 3) Kolaborasi penanganan kumuh
6	Kutai Kartanegara	Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1) Efektifitas Pelaksanaan PKM 2018 2) Kelembagaa BKM (pemilu, audit, PPM) 3) Kolaborasi penanganan kumuh

B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
1.	Kegiatan Kelembagaan	Audit KAP pelaksanaan sudah 100% Kinerja kelambagaan 100% mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit tahun buku 2018 yang dilakukan oleh KAP sudah selesai dan opini audit sudah keluar, dimana hasil opini hampir semua BKM/LKM hasil oponinya UO. 2. Penilaian kinerja kelembagaan BKM/LKM semester untuk 2018 hanya dilaksanakan pada semester 1 sedangkan semester 2 tidak dilaksanakan 3. Pemilu ulang BKM dilakukan secara berjenjang dari tingkat basis sampai kelurahan 4. Hasil pemilu ulang (gn elai dan LJU belum dicatatkan di notaris 5. Forum kolaborasi kelurahan sudah berjalan namun belum dibentuk secara formal dan cenderung bersifat <i>by accident</i> saja 6. Pelaksanaan Kegiatan PKM tahun lalu (2018) telah dilaksanakan lengkap 100% sesuai peruntukan 7. Kegiatan PKM 2019 sudah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya informasi dari tim fasilitator dan kesadaran dari BKM untuk melakukan penilaian kinerja kelembagaan secara mandiri. 2. Pemahaman anggota BKM dan Ketaatan terhadap pedoman/aturan siklus Lembaga BKM. 3. Forum kolaborasi hanya bergerak ketika sudah ada dana yang pasti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kelengkapan audit tahunan berupa kwitansi pembayaran, dan hasil opini audit 2. Melaksanakan penilaian kinerja kelembagaan semester 1 tahun 2019. 3. Pembentukan forum kolaborasi kelurahan secara formal dan memiliki rencana kerja.

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
			berjalan sesuai MS		
2.	Akses Informasi dan Akuntabilitas	100% BKM belum memiliki mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat Sosialisasi baru mencapai 40%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada kotak dan buku pengaduan di sekretariat BKM. 2. Nomor PIM (Pengelolaan Informasi dan Masalah) sudah tersosialisasi kepada masyarakat melalui papan proyek/papan informasi. 3. Telah dilakukan sosialisasi terkait kegiatan pelaksanaan BPM 2019 (<i>lokasi BPM 2019</i>). 4. RWT Tahun 2018 sudah dilaksanakan walaupun kurang maksimal dan penyusunan rencana kerja LKM 2019 belum dilakukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan pengaduan masyarakat yang masuk ke BKM/Kelurahan dan diteruskan kependamping masih bersifat lisan. 2. Nomor PIM (Pengelolaan Informasi dan Masalah) terdapat di papan proyek/papan informasi. 3. Sosialisasi pelaksanaan BPM 2019 di lakukan melalui dana PKM 2019 dan kegiatan MP2K KSM. 4. Pemahaman anggota BKM dan Ketaatan terhadap pedoman/aturan siklus Lembaga BKM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan kotak pengaduan dan buku pengaduan di sekretariat BKM. 2. Nomor PIM di tambah lagi di beberapa tempat strategis 3. Kegiatan Sosialisasi lebih di giatkan lagi terutama di lokasi kumuh
3	Kualitas dokumen perencanaan teknis	100% (2 kelurahan) dokumen perencanaan teknis telah selesai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan teknis telah disetujui sesuai ketentuan/aturan berlaku 2. Telah ditandatangani SPK LKM dengan PPK 3. Pemberkasan BPM sudah disusun LKM dengan lengkap dan ditandatangani sesuai ketentuan 4. Penanganan dampak sudah selesai (terbit SPPL DLH) 		
4	Kualitas proses pencairan BPM 2019	Dokumen penciaran BPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen teknis sudah ada dan telah mendapat 		Percepatan untuk proses pelaksanaan

NO.	TOPIK	CAPAIAN Kuantitatif	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
		100% (2 kelurahan) telah selesai	<p>persetujuan dari pihak terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. SPK sudah ditandatangani antara LKM dengan PPK 3. Pemberkasan BPM sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan 4. SPPL sudah mendapat persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup 		pembangunan fisiknya mengingat dana BPM sudah masuk rekening LKM
5	Kinerja pelaksanaan kolaborasi	67% (4 kelurahan telah melakakkan kolaborasi tahun 2018) 100% (6 kelurahan) BKM ada daftar kolaborasi tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kegiatan kolaborasi 2018 dan ada dalam list kegiatan RPLP 2. Kegiatan kolaborasi 2018 menyelesaikan masalah utama kekumuhan (7+1) indikator kumuh di delineasi 3. Forum kolaborasi sudah berjalan dan sudah teridentifikasi rencana kolaborasi 2019 4. Kolaborasi perencanaan dan penganggaran telah berjalan untuk tahun 2019 		Dana kolaborasi diarahkan untuk mengurangi luasan kumuh dan meningkatkan capaian KPI dengan melihat data Numerik (R0)
6	Efektifitas kerja KPP	100% kelurahan belum memiliki struktur KPP yang jelas dan rencana kerja KPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPP belum memiliki struktur organisasi 2. Rencana kerja rutin KPP belum ada dan berjalan secara spontan saja 3. Sumber pendanaan hanya dari swadaya dan belum ada aturan pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemahaman anggota KPP terhadap tugas pokok dan fungsinya 2. Kesadaran dari masyarakat untuk memelihara hasil kegiatan masih kurang 3. KPP belum menjalin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pemahaman dan kapasitas KPP 2. Penguatan KPP dalam rangka menjalin kolaborasi pendanaan pemeliharaan 3. Pemeliharaan

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
			<p>dana pemeliharaan dari sumber lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dana swadaya untuk pemeliharaan belum mencukupi kebutuhan pemeliharaan yang bersifat besar dan jangka panjang. 5. KPP belum memiliki pemahaman dan pengetahuan teknis tentang bagaimana melakukan pemeliharaan 6. Belum dilakukan pemeliharaan pada infrastruktur 2017/2018 secara menyeluruh 	<p>kolaborasi dengan pihak lain dalam rangka pemeliharaan hasil kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dana swadaya cenderung kecil, sehingga belum maksimal dalam perbaikan dan pemeliharaan kegiatan\ 5. Penguatan KPP belum dilaksanakan secara maksimal 6. Kegiatan pemeliharaan hasil kegiatan infrastruktur 2017/2018 masih cenderung pada fisik yang rusak saja 	<p>kegiatan oleh KPP secara menyeluruh sesuai susunan rencana kerja pemeliharaan rutin.</p>
7	Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan	100% kelurahan sudah menginput data SIM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data SIM terutama terutama untuk kegiatan tahun 2018 telah terinput di SIM Online dan sesuai dengan data lapang 2. Capaian pengurangan kumh antara R0 dan SIM masih belum sama 3. Beberapa kelengkapan DATA sim belum terupload 	Lemahnya pengendalian di tingkat karkot terhadap kualitas data SIM	Tim karkot melakukan pengendalian secara berkala terhadap inputan data SIM